

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, karena kajian pustaka memiliki fungsi untuk membatasi bidang kajian, membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif. Menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya. Mengaitkan ide dan teori dengan penerapan.

Adapun materi yang akan dikemukakan untuk pemecahan masalah yaitu kajian mengenai Administrasi Publik, Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang serta penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan proposisi

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti bertujuan sebagai acuan dasar dalam penyusunan penelitian dan bahan perbandingan. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu guna mendukung penelitian ini. Berikut adalah table penelitian terdahulu yang penliti gunakan :

Table 2.1**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang Dggunakan	Pendekatan	Metode	Teknis Analisis
1	Ulfani Rizki (2018)	Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuann polisi pamong praja kabupaten Cirebon (studi kasus jalan fatahillah)	Model van Meter dan Van Horn (1975)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi
2	Pebri Ismi Anggiyowati (2014)	Implementasi Penertiban PKL oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 (studi kasus di Kawasan taman Pancasila kabupaten karanganyar)	Teori Model Implementasi George C. Edward III	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi
3	Achmad Yulianto (2016)	Implementasi tugas satuan polisi pamonng praja (satpol pp) dibidang penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kota pati	Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi

2.1.2. Kajian Terhadap *Grand Theori*

2.1.2.1. Teori Administrasi

Di segala aktivitas ataupun di kehidupan sehari-hari maupun didalam dunia kerja tidak asing lagi dengan istilah administrasi. Kata administrasi akan sering kita temui yang akan digunakan di kehidupan sehari-hari. Administrasi berasal dari Bahasa latin yang terdiri dari dua kata, *ad* (intensif) dan *ministrare* (melayani, membantu, memenuhi). Namun tidak semua orang mengetahui apa sebenarnya dimaksud dengan administrasi itu sendiri. Administrasi adalah segala usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bidang kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan administrasi senantiasa dikembangkan oleh pola pemikiran yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan berbagai segala aktivitas dan kegiatan manusia yang secara sengaja dilakukan agar tidak terjadi suatu kegagalan dalam pelaksanaan berbagai Tindakan yang telah direncanakan sebelumnya.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pengertian administrasi menurut Ismail Nawawi adalah mencatat setiap komponen administrasi yang menjadi komponen manajemen, organisasi, ataupun kegiatan operasional (Nawawi, 2009; 33). Adapun pengertian administrasi secara luas menurut Sondang P. Siagian adalah keseluruhan proses kerja ssama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rassionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Ayub, 2007; 30).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah segala kegiatan atau aktivitas dalam pengolahan data dan informasi yang meliputi kegiatan atau aktivitas catat-mencatat, surat-menyurat, serta pembukuan secara tertulis yang diperlukan didalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas berdasarkan pendapat ahli diatas adalah mengenai kerja sama antara dua orang atau lebih untukmencapai tujuan bersama.

Ulbert Sillalahi dalam bukunya yaitu **Studi tentang ilmu administrasi (2016: 5)** administrasi dalam arti sempit yaitu:

“Administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya Kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas mengenai pengertian administrasi secara luas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kerja sama yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok atau lebih dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai suatu metode, administrasi berlangsung didalam organisasi formal, yaitu suatu unit sosial yang dibentuk dengan tujuan mencakup unsur-unsur konflik dan unsur-unsur perubahan. Organisasi dengan struktur formalnya, kelompok sosial, lingkungan sosial, sumber-sumber dan tujuan-tujuan merupakan bahan dasar

seorang administrator bekerja. Tugas seorang administrator adalah melaksanakan suatu pekerjaan melalui proses pengorganisasian sumber-sumber dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut **The Liang Gie Harbani Pasolong (2017)** mendefinisikan administrasi, “administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Menurut **Siagian (2017)** mendefinisikan administrasi, “administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat menyimpulkan bahwa administrasi sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Selain itu untuk lebih memahami apa itu administrasi, peneliti definisi menurut **White** yang dikutip **Maksudi** dalam **Dasar-dasar Administrasi Publik (2017: 27)**, “Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat disetiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil”.

Berdasarkan definisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih demi

tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan

efisien.

Teori administrasi yang masih sesuai dengan tuntutan manusia tersebut inilah dikategorikan sebagai teori actual, terutama yang berkaitan dengan struktur hubungan, legalitas kekuasaan, kesepakatan tujuan, peran yang dimainkan, tanggung jawab kegiatan, jaringan komunikasi dan factor-faktor lain dalam melaksanakan kerja sama.

2.1.2.2. Teori Administrasi Publik

Pada dasarnya teori administrasi Publik merupakan segala aktivitas suatu organisasi atau instansi pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di kehidupan masyarakat, baik didalam ruang lingkup daerah maupun nasional. Administrasi publik pada intinya melaksanakan pembangunan, mengurus, dan memberikan pelayanan untuk kepentingannya masyarakat. Administrasi berada di sebuah negara merupakan sebuah kemutlakan dan keharusan yang merupakan suatu perangkat pengaturan dan keteraturan yang dapat merupakan suatu pelayanan untuk melayani masyarakat umum. Namun akan tetapi berbalik pada pelayanan terhadap negara. Meskipun negara sebenarnya diadakan untuk kepentingan orang banyak dan memang public pun dapat diartikan sebagai negara disatu sisi kepentingan masyarakat umum dilayani pemerintah.

Menurut **Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro** dalam **Sodikin (2015: 5)** lima definisi yang dikemukakan tentang pengertian administrasi publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Public Administration is cooperative group effort in public setting* (Administrasi

- Publik adalah suatu kerja sama kelompok didalam lingkungan pemerintahan);
- 2) *Public Administration covers all three branches: Executive, legislative, and judikatif, and their interrelationship* (Administrasi Publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislative, dan yudikatif, serta hubungan antar mereka);
 - 3) *Public Administration has an important role formulating of public policy and is this a part of the political process* (Administrasi Publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan negara, dan karenanya merupakan bagian dari proses politik);
 - 4) *Public Administration is cosely associated with numerous private groups and individuals in providing service to the community* (Administrasi Publik sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelommpok swasta dan individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat);
 - 5) *Public Admionistrtrtion is different in significant ways from private administration* (Administrasi Publik di dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertiannya dengan administrasi swasta)

Administrasi public membahas keputusan-keputussan yang mempengaruhi kehidupan rakyat, mengatasmakan publik, dan menggunakan sumber daya publik. Oleh karena itu, orang-orang yang bekerja dalam administrasi publik bukan hanya kelompok pegawai negeri saja. Pada tiap tingkatan pemerintah kinni ada organisasi-organisasi egensi publik komisi, dan korporasi public, yang kerja demi kepentingan publik.

Menurut **Gordon** yang dikutip **Syafie** dalam **buku Ilmu Administrasi Publik (2006: 25)**, yaitu :

“Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum serta peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif, dan pengadilan”.

Dari pernyataan ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa administrasi public berkaitan dengan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan public serta berkaitan dengan berbagai permasalahan manusiawi dan usaha untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Menurut **Dwight Waldo (2017)** mendefinisikan bahwa “Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya yang mencapai tujuan pemerintah”.

Menurut **Nicholas Henry (2017)** mendefinisikan bahwa “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efisiensi, efektivitas, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik”

Dari beberapa definisi menurut ahli tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok

orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Menurut **Gray (2017)** menjelaskan **Peran Administrasi Publik dalam Masyarakat**, yaitu sebagai berikut:

- a) Dapat menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara keadilan.
- b) Melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri merweka sendiri dalam bidang kesehatan, Pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.
- c) Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi dari generassi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntunan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi, dan selaras dengan budaya lain dilingkungannya.

Dan kemudian menurut **Siagian** yang dikutip **Syafri** dalam **Studi tentang Administrasi (2015: 9)**, mendefinisikan bahwa “Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.

Menurut uraian definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa admnistrasi publik adalah kegiatan penyelenggaraan dalam rangkaian kerja sama yang sukarela dan ikhlas dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur pemerintahan dalam

menjalankan dan mengatur kekuasaan negara agar mencapai secara efektif dan efisien yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.3. Kajian Terhadap *middle theory*

2.1.3.1. Teori Implementasi Kebijakan

konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out” (menyediakan sarana untuk melaksanakan); dan “to give practical effect to” (menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu). Sesuai konsep di atas kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi ialah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga di dalam negara.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang akan direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam Studi Kebijakan Publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mengutamakan

mekanisme penjabaran dan keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa saja yang

memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Ada dua pilihan Langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau malalui formulasi kebijakan. Kebijakan merupakan salah satutahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Menurut teori **Grindle dalam Akib (2010: 2)** merupakan “proses umum tindakan administratif yang dapat deteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran”.

Menurut **Lane dalam Akib (2010: 2)** dabagi dalam dua bagian yakni formula implementasi yaitu fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasilsebagai produk, dan hasil dari akibat dan yang kedua adalah kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Menurut **Santoso (2008: 43)** mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah sebuah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan secara efektif”. Implementasi ini merupakan pelaksanaan dari naeka program yang dimaksud dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan yang diperkenalkan oleh **Edward III** dalam **Akib (2010: 2)**, implementasi kebijakan diperlukan adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Menurut **Edward III** terdapat empat faktor yang digunakan untuk memecahkan masalah kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk aliran kerja birokrasi. Keempat kriteria tersebut perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

Dari definisi diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu bentuk aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik untuk mencapai tujuan dari sebuah permasalahan.

2.1.3.2. Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pangkalpinang), penulis menggunakan teori dari **Van Meter** dan **Van Horn** dikutip **Leo Agustino** dalam bukunya “**Dasar-dasar Kebijakan Publik**”

Van Meter dan **Van Horn** menyatakan bahwa ada beberapa variabel yaitu:

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan memang realistis dengan sosiokultur yang ada ditingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan terlalu ideal bahkan selalu

utopis untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan public hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik, tetapi Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber day aitu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial, fasilitas dan waktu. Ini karena mau tidak mau Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucurn dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah unntuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekrja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbenturdengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Hal

ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan public akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakalah hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan public dalam perspektif yang ditawarkan oleh **Van Meter dan Van Horn** adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendinging keberhasilan kebijakan ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan social, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.1.3.3 Konsep Kebijakan Publik

Menurut **Mac Rae dan Wilde (1979)** (dalam **Sutyana. 2009: 8**) menyatakan bahwa:

“kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan oran perindividu atau golongan maupun kelompok.

Kebijakan publik sebagai serangkain tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap Sebagian besar orang. Dalam pengertian tersebut mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai yang merupakan sebuah pilihan pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang”.

Menurut **Dye (1978)** (dalam **Sutyana, 2009: 9**) menyatakan bahwa:

“kebijakan adalah apabila pemerintah mengambil keputusan (memilih sesuatu) untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya, dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata bukan hanya merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja, dan seperti telah dikatakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintahpun termasuk kebijakan.

Menurut **Friedrich** sebagaimana (dalam **Agustino, 2008: 7**):

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan, terutam dalam kaitan adanya peran fungsional pemerintah diranah publik sebagai pelayan masyarakat”.

Menurut **David Easton** (dalam **Agustino, 2006: 8**) mendefinisikan bahwa

“kebijakan publik sebagai otoritas dalam sebuah system politik, yaitu: para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislative, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya”.

Dari definisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu alat berupa tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam

mengambil keputusan atas suatu masalah/hambatan yang terjadi untuk mewujudkan sasaran yang dituju, yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap Sebagian besar orang.

2.1.4. Kajian Terhadap *Operasional Theory*

2.1.4.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang dicapai. Untuk mengimplementasikan publik, ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu dengan langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur, yaitu:

- 1) Proses, merupakan serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk memujudkan suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Tujuan, merupakan suatu yang hendak dicapai melalui segala kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan.
- 3) Hasil dan dampak, yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan dari suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan serangkaian implementasi, yaitu visi, misi, cara dan strategi, program, kebijakan, proyek, dan kegiatan yang menghasilkan umpan balik. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan dalam suatu organisasi mulai dari misi hingga pada pemanfaatan dari suatu proses yang perlu umpan balik.

2.1.4.2 Konsep Penertiban

Usaha atau kegiatan sebagai suatu tindakan agar pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana maupun tujuan yang dapat terwujud adalah salah satu konsep penertiban. Kegiatan penertiban ini dapat berupa kegiatan yang dalam bentuk penertiban langsung dan tidak langsung. Tetapi yang harus diperhatikan jika penertiban dilakukan melalui proses mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan, dan rapi. Sedangkan ketertiban adalah peraturan atau keadaan yang serba teratur baik. Ketertiban ada kalanya diartikan sebagai ketertiban, kesehjahteraan, dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umu.

Dari penjelasan mengenai konsep penertiban penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep penertiban merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang diambil atau dilakukan oleh seseorang petugas atau kelompok orang pribadi maupun instansi pemerintahan tertentu untuk menertibkan segala macam penyimpangan yang terjadi sehingga menciptakan suatu kondisi yang tertib dan teratur serta dinamis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ketertiban sangat diperlukan untuk menjaga suatu wilayah atau daerah agar tetap terjaga kestabilan serta keteraturannya agar dapat menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa adanya gangguan-gangguan yang menghambat jalannya aktifitas tersebut.

2.1.4.3. Konsep Pedagang Kaki Lima

Untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan komersial di jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dapat diartikan sebagai pedagang kaki lima atau disingkat PKL. Keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan di Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pedagang kaki lima termasuk usaha kecil yang berorientasi pada keuntungan sector informal. Pedagang kaki lima mempunyai cara sendiri dalam mengelola usahanya untuk mendapatkan laba atau untung. Pedagang kaki lima itu sendiri menjasi manajer tunggal yang menangani usahanya sendiri mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengendalikan atau mengontrol usahanya. Pedagang kaki lima biasanya tidak mempunyai dasar Pendidikan formal dibidang wirausaha sehingga manajemen usahanya didasarkan pada pengalaman dan pemikiran pribadi.

Menurut **Evan dan Korfil dalam (Ali, 2008)** menyatakan bahwa “pedagang kaki lima adalah bagian dari sector informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa diluar control pemerintah dan tidak terdaftar”.

Dari pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan pedagang yang menjajakan barang dagangannya ditempat-tempat umum yang strategis yang biasa dilewati banyak orang seperti trotoar, di taman kota, di perempatan jalan, dan lainnya. Tempat penjualan pedagang kaki lima yang relative permanen yaitu berupa kios-kios kecil, gerobak dan sebagainya. Barang yang dijual biasanya berupa makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang lainnya.

2.1.4.4. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan setiap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan membantu seluruh kegiatan pemerintah, PP 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja “satuan polisi pamong praja dibentuk menegakkan Peraturan Daerah (perda) dan peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

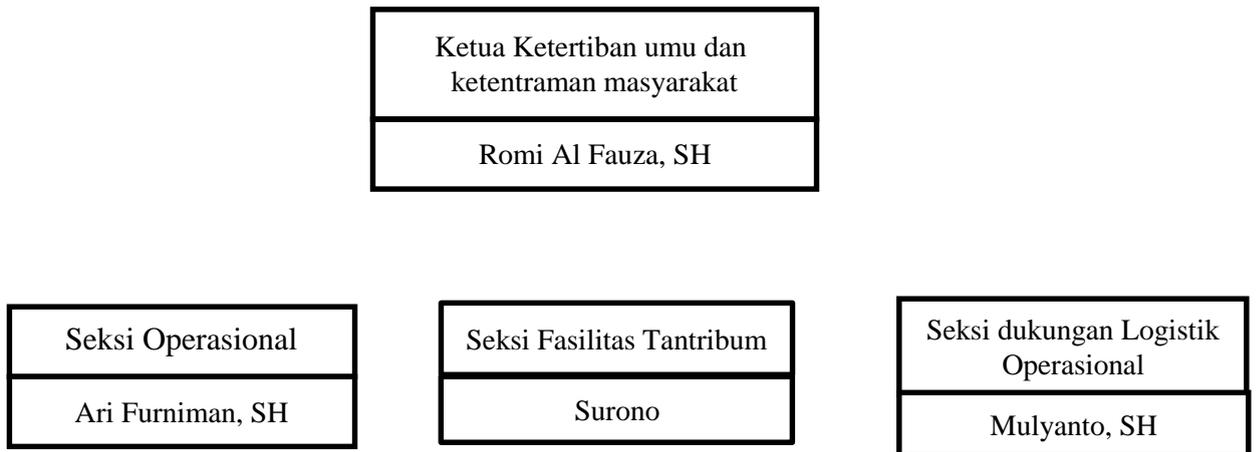
Organisasi dan data kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Peraturan Daerah, dan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sehingga disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai institusi yang ada hakekatnya satuan polisi pamong praja ialah sebuah organisasi. Organisasi satuan polisi pamong praja bertujuanyang secara umum menegakkan Perda dan Perkada, melindungi dan mengayomi masyarakat, serta membangun agar tercapainya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang



2.2. Kerangka Berpikir

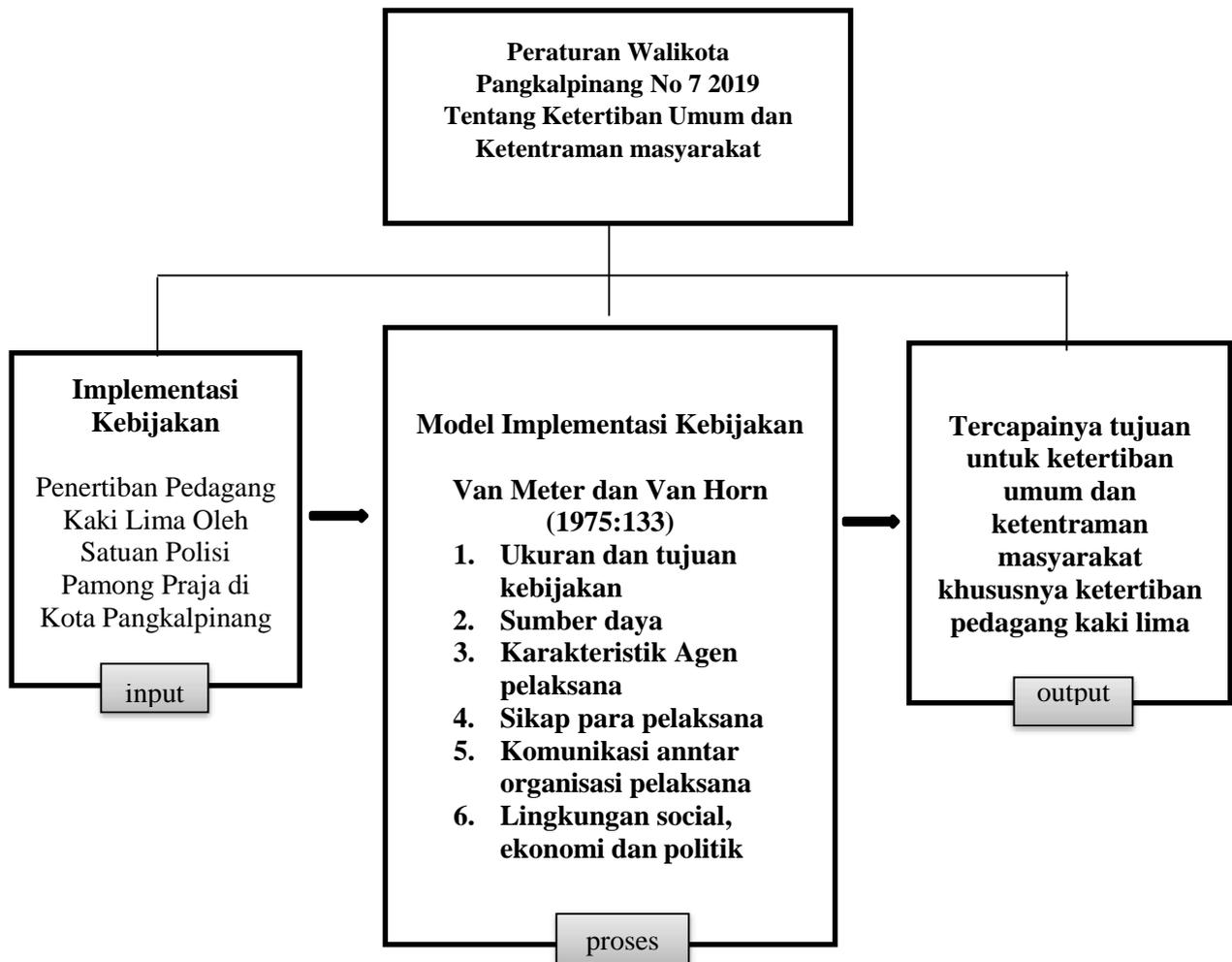
Kerangka berpikir adalah teori-teori yang digunakan peneliti sesuai dengan pedoman maupun landasan dalam suatu pola pemikiran untuk memecahkan suatu permasalahan dalam sebuah penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini dengan judul Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang). Maka peneliti mengacu kepada pendapat dari para ahli tentang teori-teori yang berhubungan dengan fokus dan lokus penelitian. Serta sebagai pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan realita dilapangan dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Dengan adanya ukuran atau indicator pengukurannya, maka dari itu peneliti menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh

Van Meter dan **Van Horn (1975:133)** disebut dengan *A Model of the police implementation* yang meliputi :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi pelaksana
6. Lingkungan social, ekonomi dan politik

Berdasarkan uraian diatas untuk mempermudah pemecahan masalah maka peneliti mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



2.3. Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap suatu fenomena yang terjadi. Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas, tentang proposisi dari penelitian ini yang berfokus pada implementasi kebijakan, maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota Pangkalpinang.
2. Terdapat solusi untuk factor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dapat teridentifikasi.